

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

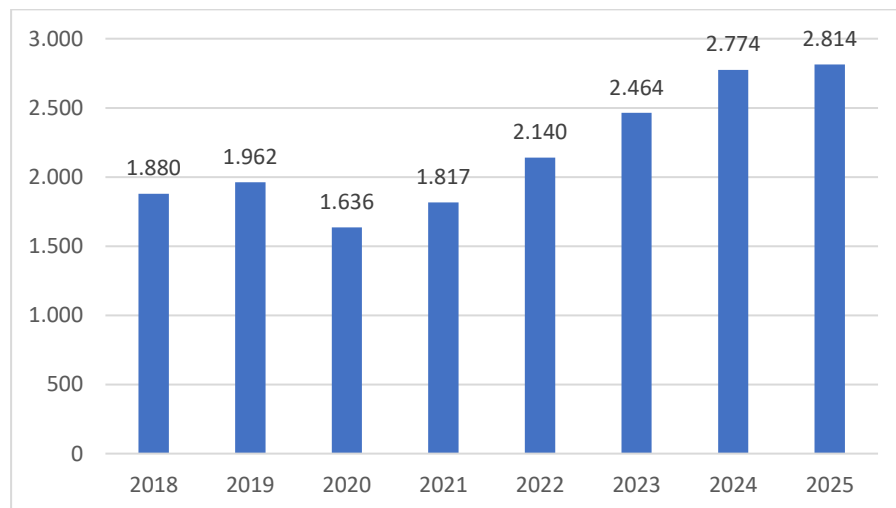
Penerapan otonomi daerah di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dalam hal tersebut, kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan atau pendapatan menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal sendiri merupakan pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan terkait penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah dan diyakini sebagai mekanisme paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya publik (Farida et al., 2021). Pajak daerah, sebagai komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta mencerminkan kapasitas ekonomi dan fiskal suatu daerah. Bahl & Bird (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi pajak daerah, semakin besar pula tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.

Namun demikian, penerapan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan antara Indonesia bagian barat dan timur masih terlihat jelas dalam berbagai indikator ekonomi seperti kualitas infrastruktur, kapasitas fiskal, bahkan kontribusi wilayah dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kontribusi PDRB

wilayah timur terhadap perekonomian nasional relatif lebih kecil dibandingkan wilayah barat, yang diikuti oleh rendahnya penerimaan pajak daerah sebagai persentase dari total pendapatan daerah. Data lain juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan regional di wilayah timur Indonesia tergolong tinggi dalam periode 2016-2025. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi antar wilayah barat dan timur saja, tetapi juga secara internal antar-provinsi dan antar-kabupaten di dalam wilayah timur itu sendiri (Rosmeli & Nurhayani, 2014). Wilayah timur Indonesia yang mencakup kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi, Maluku, dan Papua, merepresentasikan paradoks pembangunan yang kompleks dalam mozaik ekonomi nasional. Di satu sisi, wilayah timur Indonesia diberkati dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai dari cadangan nikel terbesar di dunia yang berpusat di Sulawesi dan Maluku Utara, hingga kekayaan mineral dan emas yang berada di Papua (Razak, 2021: 192). Namun, keberlimpahan sumber daya ini belum menjadi kesejahteraan masyarakat yang inklusif maupun kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan serta mengindikasikan bahwa potensi ekonomi yang ada di wilayah belum sepenuhnya terkonversi menjadi basis pajak daerah yang optimal.

Dalam persoalan pembangunan daerah pembangunan daerah yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pajak daerah menjadi syarat penting untuk mengurangi ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer berpotensi menimbulkan *fiscal dependency syndrome*, di mana pemerintah daerah kurang memiliki insentif untuk menggali pajak lokal secara optimal (Sasana, 2025). Oleh karena itu, penguatan pajak daerah tidak hanya relevan dari sisi pembiayaan

pembangunan tetapi juga penting untuk memperkuat akuntabilitas fiskal dan kualitas tata kelola pemerintah daerah. Hasil studi yang dilakukan Yossinomita et al (2025) menemukan bahwa provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki rasio pajak cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah barat Indonesia. Rendahnya rasio pajak tersebut dikaitkan dengan tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat, keterbatasan diversifikasi ekonomi, serta dominasi sektor primer yang kurang memberikan kontribusi optimal terhadap pajak daerah.



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1. 1 Rata-Rata Penerimaan Pajak Daerah Wilayah Timur Indonesia Periode 2018-2025 (Miliar Rupiah)

Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak daerah di wilayah timur Indonesia selama periode 2018-2025 yang menunjukkan dinamika fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode penelitian. Pada tahun 2018, penerimaan pajak daerah berada pada rata-rata kisaran 1.880 miliar rupiah, kemudian mengalami peningkatan sebesar 4,21% menjadi 1.962 miliar rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 terlihat terjadi penurunan di mana

penerimaan merosot ke angka 1.636 miliar rupiah atau tumbuh negatif sebesar -19,94%. Penurunan tersebut terjadi karena dampak perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan kontraksi aktivitas ekonomi daerah, penurunan mobilitas masyarakat serta melemahnya sektor-sektor utama yang menjadi basis pemungutan pajak daerah (Cahyati, 2022). Pada tahun 2021, penerimaan pajak tumbuh 9,96% menjadi 1.817 miliar rupiah, dan mencapai lonjakan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 15,09% dengan nilai mencapai 2.140 miliar rupiah. Kenaikan drastis di tahun 2022 ini mencerminkan keberhasilan relaksasi ekonomi dan normalisasi aktivitas industri di wilayah timur. Meskipun pada tahun 2023 laju pertumbuhan sedikit melandai di angka 13,14% dan mencapai 2.464 miliar rupiah, tren absolut tetap menunjukkan kenaikan yang konsisten pada tahun 2024 dengan angka laju pertumbuhan 11,20% dengan angka penerimaan pajak mencapai 2.774 miliar rupiah. Pada tahun 2025, Penerimaan pajak terus meningkat meskipun angka pertumbuhannya menurun drastis yakni hanya menambah sebesar 1,41% dengan nilai 2.814 miliar rupiah. Peningkatan tersebut sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah, meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi serta pulihnya investasi di berbagai sektor di wilayah timur Indonesia (Rusman et al., 2025).

Meskipun demikian, pola peningkatan penerimaan pajak daerah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kapasitas pajak daerah yang berkelanjutan. Pertumbuhan penerimaan pajak cenderung bersifat bertahap dan sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi, sebagaimana tercermin dari penurunan tajam pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa basis pajak

daerah di wilayah timur Indonesia masih relatif sempit dan sangat bergantung pada dinamika aktivitas ekonomi jangka pendek. Kondisi ini juga mencerminkan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer dan aktivitas informal, sehingga potensi pajak daerah belum tergarap secara optimal (Hanifah et al., 2025). Grafik penerimaan pajak daerah wilayah timur Indonesia periode 2018–2025 tersebut tidak hanya menggambarkan perkembangan nominal penerimaan pajak, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam kapasitas fiskal daerah. Fluktuasi dan pertumbuhan yang relatif moderat tersebut menjadi dasar empiris yang kuat untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi memengaruhi pajak daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Analisis terhadap mekanisme ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan fiskal daerah yang tidak hanya meningkatkan belanja dan investasi, tetapi juga mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan menjembatani pengaruh secara tidak langsung dari dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi dalam penelitian ini sejalan dengan konsep *multiplier effect* yang menyatakan bahwa belanja publik dan investasi merupakan instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan pajak daerah (Islamiah, 2015). Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut belum sepenuhnya terkonfirmasi secara empiris di wilayah timur Indonesia, mengingat karakteristik struktural wilayah yang masih didominasi

oleh sektor primer, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya ketergantungan pada transfer fiskal dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpotensi berperan sebagai jalur penghubung yang menentukan sejauh mana kebijakan fiskal dan investasi mampu dikonversi menjadi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Gambar 1.2 di bawah ini memperlihatkan perbedaan pola dan stabilitas laju pertumbuhan ekonomi antara tingkat nasional dan wilayah timur Indonesia selama periode 2019-2024. Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia menunjukkan dinamika yang jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional selama periode 2019-2024.



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Wilayah Timur Indonesia Periode 2019-2025 (Persen)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat dinamika pertumbuhan ekonomi yang cukup fluktuatif antara Wilayah Timur Indonesia (WTI) dan rata-rata nasional Indonesia pada periode 2019 hingga 2025. Pada tahun 2019, kondisi awal menunjukkan pertumbuhan yang relatif sejajar, di mana Indonesia berada di angka

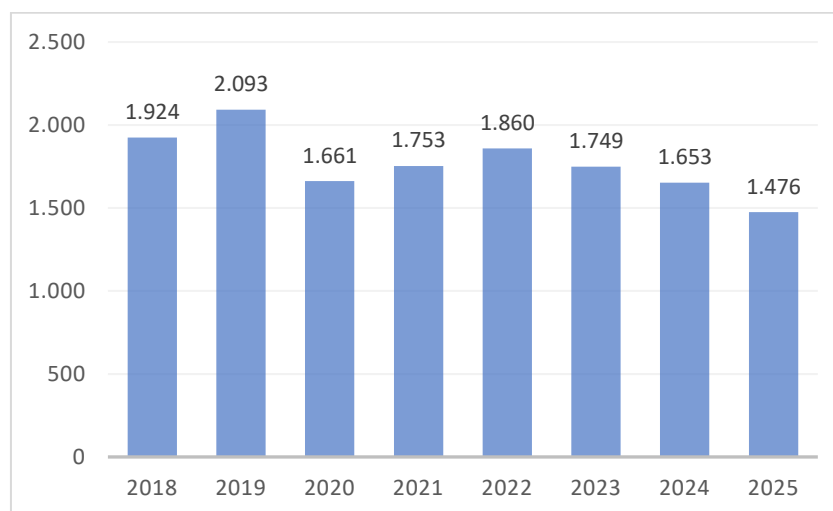
5,02% dan WTI sedikit di bawahnya pada 4,98%. Namun, titik balik yang paling signifikan terlihat pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Meskipun keduanya mengalami kontraksi hebat, WTI menunjukkan resiliensi yang lebih kuat dengan angka pertumbuhan -0,35%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang merosot tajam hingga ke level -2,07%.. Memasuki fase pemulihan pada tahun 2021 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten melampaui pertumbuhan di WTI. Laju pertumbuhan nasional melonjak kembali ke angka 3,70% (2021) dan mencapai puncaknya di angka 5,31% pada tahun 2022. Di sisi lain, WTI mengikuti tren pemulihan namun dengan akselerasi yang lebih lambat, yakni mencapai 2,95% pada 2021 dan 4,59% pada 2022. Grafik menunjukkan adanya tren konvergensi atau penyempitan celah pertumbuhan menjelang tahun 2025. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi WTI mulai mengejar ke angka 4,84%, sementara nasional sedikit melandai ke 5,03%. Tren ini berlanjut hingga tahun 2025, di mana kedua garis bertemu di titik yang sama yaitu 4,45%.

Ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia menjadi landasan krusial dalam memahami bagaimana instrumen fiskal dan investasi bekerja. Secara teoritis, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah dialokasikan untuk membangun infrastruktur serta layanan publik yang mampu menjadi stimulus aktivitas ekonomi lokal. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa meskipun aliran DAK ke wilayah timur terus meningkat, efektivitasnya dalam menciptakan kemandirian fiskal melalui penerimaan pajak daerah masih menghadapi tantangan besar. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Harahap et al (2021) mengenai dampak dari dana alokasi terhadap pertumbuhan wilayah,

terdapat *time lag* antara pembangunan infrastruktur dengan peningkatan produktivitas masyarakat yang dapat dipajaki. Hal tersebut diperumit dengan karakteristik investasi di wilayah timur Indonesia yang cenderung padat modal di sektor ekstraktif yang seringkali tidak memberikan dampak instan terhadap pendapatan asli daerah apabila pertumbuhan ekonomi tidak inklusif (Pratiwi, 2023). Pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia sering kali bersifat *enclave economy*, di mana angka pertumbuhan yang tinggi hanya dinikmati oleh sektor-sektor tertentu tanpa memperluas basis pajak daerah secara signifikan (Fauzan & Rahman, 2025).

Berbagai faktor pendorong penerimaan pajak daerah di wilayah timur secara langsung antara lain yaitu dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi. Dana alokasi khusus yang merupakan transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Menurut peraturan perimbangan keuangan, dana alokasi khusus bertujuan membantu daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah agar tetap mampu melaksanakan pembangunan sektor-sektor prioritas. Besaran dana alokasi khusus suatu daerah tidak tetap karena tergantung pada ketersediaan APBN dan prioritas nasional. Alokasi dana ini hanya diberikan ke daerah yang memenuhi kriteria masalah khusus seperti daerah dengan infrastruktur dasarnya tertinggal. Dengan kata lain, dana alokasi khusus merupakan instrumen desentralisasi fiskal untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar-daerah dan menunjang pembangunan daerah sesuai kebutuhan. Dana alokasi khusus juga diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan yang berupa

pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana prasarana fisik pelayanan publik berumur ekonomis panjang (Waskito et al., 2019).



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1. 3 Rata-Rata Dana Alokasi Khusus di Wilayah Timur Indonesia Periode 2018-2025 (Miliar Rupiah)

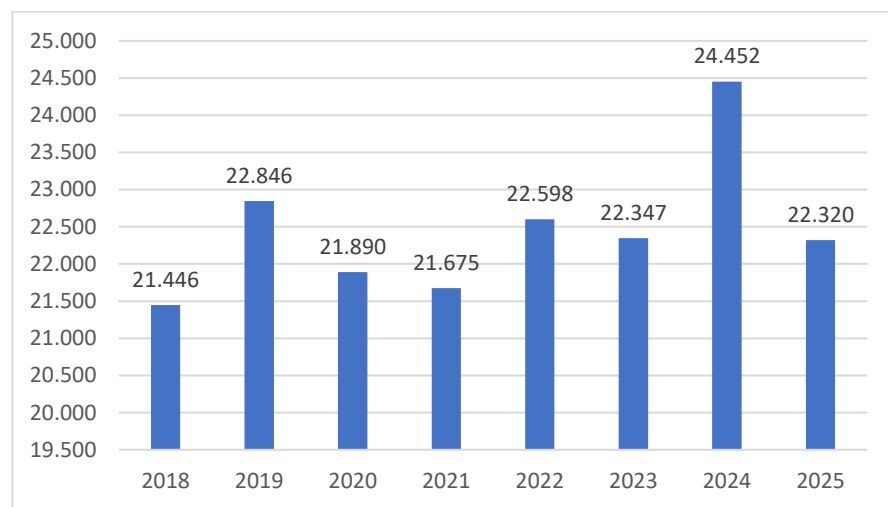
Gambar 1.3 menunjukkan dinamika alokasi fiskal yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun di akhir periode. Pada tahun 2018, rata-rata dana alokasi khusus tercatat berada di kisaran 1.924 miliar rupiah dan mencapai titik puncaknya pada tahun 2019 dengan angka menembus 2.093 miliar rupiah. Peningkatan signifikan di tahun 2019 ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar di wilayah timur sebelum terjadinya disrupsi global. Namun, memasuki tahun 2020, dana alokasi khusus mengalami penurunan tajam ke angka sekitar 1.661 miliar rupiah sebagai dampak langsung dari kebijakan *refocusing* anggaran nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 (Reny et al., 2024). Meskipun sempat menunjukkan tren pemulihan moderat pada tahun 2021 dan 2022 di kisaran, dana alokasi khusus kembali

mengalami penurunan drastis pada tahun 2023 hingga 2025 pada angka 1.476 miliar rupiah.

Fenomena penurunan dana alokasi khusus di akhir periode ini memberikan fakta empiris yang krusial bagi latar belakang penelitian mengenai penerimaan pajak daerah di wilayah timur Indonesia. Secara empiris, penurunan transfer pusat seperti DAK menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah. Penurunan alokasi DAK pada tahun 2023-2024 kemungkinan besar dipengaruhi oleh implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mereformasi skema transfer ke daerah agar lebih berbasis kinerja dan fokus pada layanan publik dasar.

Selain itu, pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia juga mengelola belanja daerah yaitu semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih daerah. Secara umum, belanja daerah mencakup belanja operasional seperti belanja pegawai, barang/jasa, subsidi, dan lain sebagainya serta belanja modal seperti investasi aset tetap daerah seperti infrastruktur. Belanja daerah merupakan bagian dari APBD yang dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat daerah. Belanja daerah yang efektif diharapkan menjadi stimulus ekonomi lokal. Belanja modal sebagai bagian dari belanja daerah sangat penting karena penyediaan infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan menarik investor untuk membuka

usaha di daerah. Dengan demikian, komposisi dan efisiensi belanja daerah berpengaruh pada output ekonomi belanja di sektor-sektor produktif (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) dapat menciptakan efek *multiplier* yang mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, belanja yang kurang tepat sasaran atau tidak efisien tidak akan berdampak signifikan bagi ekonomi daerah (Parena et al., 2025).



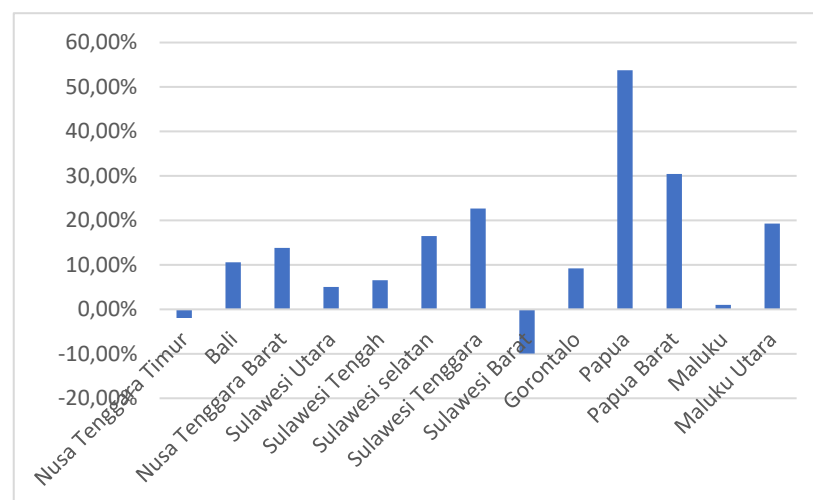
Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1. 4 Rata-Rata Belanja Daerah di Wilayah Timur Indonesia Periode 2018-2025 (Miliar Rupiah)

Grafik di atas menunjukkan tren fluktuasi pada rata-rata belanja daerah di wilayah timur Indonesia selama periode 2018 hingga 2025. Secara keseluruhan, belanja daerah mengalami dinamika naik-turun yang cukup terlihat, diawali dengan kenaikan pada 2019 sebesar 22.846, diikuti penurunan berturut-turut selama dua tahun pada 2020 dan 2021 hingga menyentuh angka 21.675. Kondisi ini mencerminkan adanya efisiensi atau realokasi anggaran di masa pandemi. Belanja daerah kemudian mulai bangkit kembali pada 2022 dan mencapai puncaknya yang paling signifikan pada tahun 2024 dengan nilai 24.452. Namun, tren ini tidak berlanjut, karena pada tahun 2025 angka belanja kembali mengalami penurunan ke

22.320, yang menunjukkan bahwa alokasi belanja di wilayah tersebut masih bersifat fluktuatif dan belum mencapai pola pertumbuhan yang linier.

Di samping peran instrumen fiskal melalui dana alokasi khusus dan belanja daerah variabel Investasi memegang peranan penting sebagai mesin penggerak utama ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Dalam konteks pembangunan regional, investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berfungsi sebagai suplemen bagi keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produksi lokal (Nugroho et al., 2026). Secara empiris, wilayah timur Indonesia, khususnya Sulawesi dan Maluku Utara, telah menjadi magnet investasi besar di sektor hilirisasi pertambangan dalam beberapa tahun terakhir.



Sumber: Data diolah, 2026

Gambar 1. 5 Rata-Rata Pertumbuhan Investasi (CAGR 2018-2025) Wilayah Timur Indonesia (Persen)

Grafik tersebut menggambarkan rata-rata laju pertumbuhan majemuk tahunan atau Compound Annual Growth Rate (CAGR) investasi di berbagai provinsi Wilayah Timur Indonesia selama periode 2018-2025. Secara keseluruhan,

terlihat ketimpangan pertumbuhan yang sangat mencolok antarwilayah. Provinsi Papua menjadi pemimpin utama dengan tingkat pertumbuhan investasi yang fenomenal, mencapai lebih dari 50%, jauh melampaui provinsi lainnya seperti Papua Barat yang berada di sekitar 30% dan Sulawesi Tenggara 23%. Kontras dengan performa tersebut, terdapat dua provinsi yang mencatatkan pertumbuhan negatif, yaitu Sulawesi Barat yang merosot hingga sekitar -10% dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terkoreksi tipis. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia memiliki tarik dan efektivitas penyerapan investasi di tingkat provinsi yang bersifat heterogen.

Berdasarkan fenomena fluktuasi ekonomi yang kontradiktif dengan arah kebijakan fiskal serta dinamika arus investasi di wilayah timur Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak untuk membedah kembali mekanisme pencapaian kemandirian fiskal di wilayah tersebut. Adanya kesenjangan penelitian yang menunjukkan belum banyaknya penelitian mengenai interaksi antara instrumen transfer pusat, efektivitas belanja lokal, dan kontribusi investasi serta peran laju pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi terhadap penguatan basis pajak daerah menjadi motivasi utama dilakukannya studi ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan empiris mengenai apakah pertumbuhan ekonomi di wilayah timur benar-benar berfungsi sebagai jembatan yang efektif atau justru menjadi penghambat dalam mentransformasi modal dan anggaran menjadi pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan urgensi pembangunan ekonomi yang inklusif dan kebutuhan akan optimalisasi pendapatan asli daerah di

tengah penurunan tren dana transfer, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Fokus penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, dan Investasi Terhadap Pajak Daerah di Wilayah Timur Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel *Intervening*”. Melalui analisis regresi data panel dan uji sobel, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah literatur dengan memberikan bukti empiris mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi perantara dalam hubungan dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi dengan penerimaan pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia selama periode 2018-2025?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, belanja daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak di wilayah timur Indonesia selama periode 2018-2025?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus, belanja daerah, dan investasi terhadap penerimaan pajak di wilayah timur Indonesia selama periode 2018-2025 melalui pertumbuhan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus, belanja daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia periode 2018-2025.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus, belanja daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di wilayah timur Indonesia periode 2018-2025.
3. Untuk mengetahui pengaruh dan alokasi khusus, belanja daerah dan investasi terhadap penerimaan pajak di wilayah timur Indonesia periode 2018-2025 melalui pertumbuhan ekonomi.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya di bidang ekonomi makro dan pembangunan
2. Menambah referensi literatur akademik mengenai hubungan antara dana alokasi khusus, belanja daerah dan investasi dengan penerimaan pajak daerah khususnya di wilayah timur Indonesia
3. Menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi mengenai DAK tematik, komposisi belanja daerah yang lebih produktif, serta optimalisasi pajak daerah untuk memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi Kementerian Investasi serta pelaku usaha, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam pemetaan faktor fiskal yang relevan bagi persebaran realisasi investasi lintas provinsi di wilayah timur Indonesia.
3. Bagi para akademisi atau peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan metodologis mediasi data panel atau uji sobel dalam kajian fiskal dengan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah periode terbaru.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 13 provinsi wilayah timur Indonesia dengan mengakses situs resmi Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi, dan Badan Pusat Statistik.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Agustus 2025 sampai bulan Desember 2025, dengan waktu penelitian terlampir pada tabel di bawah ini

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2025												2026																							
		Okt				Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																																				
2	Penyusunan Proposal Skripsi																																				
3	seminar proposal																																				
4	Revisi Proposal Skripsi																																				
5	Penyusunan Seminar Hasil																																				
6	Seminar Hasil																																				
7	Revisi seminar hasil																																				
8	Penyusunan skripsi																																				
9	Sidang skripsi																																				
10	Revisi Skripsi																																				